



NEGARA SEJAHTERA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Welfare State in the Perspective of Maqashid Sharia)

Hamdani

Institut Agama Islam Ngawi

Abstract

The problem of poverty and economic injustice is a problem for every country in the world, including in Indonesia. The G-20 world-level economic forum and the World Bank noted in 2018 that the world's poorest countries still account for 40% of the world's total countries. Indonesia which is a member of a developing country, economic growth only recorded 5.02% of the total GDP of the Indonesian population in 2019. This means that Indonesia is categorized as a country that is not yet prosperous by the World Bank, because the number of poor people in Indonesia is still above 10%. To solve poverty and economic injustice, it is necessary to have concrete and sustainable steps in the welfare of its people. Olaf Corry asserted that to make a prosperous country involve three stakeholders working together to improve community welfare. First, government policy on social security. Second, the involvement of the private sector in the economic growth of the industry, third, the involvement of non-profit organizations or social volunteers aimed at helping the community in fostering the economic sector. Meanwhile, As-syatibi, an Islamic economic figure who is popular with the sharia maqashid, explained that in order to achieve the State as needed, five aspects of human life including Indonesian people are needed. Maintaining human reason, pious soul, religion, descent and wealth. These five basic phases must be owned by every Indonesian citizen if they want to be called independent and historically sharia economically.

Keywords: Welfare state, Maqashid Sharia, Islamic economics

Abstrak

Persoalan kemiskinan dan ketidak-adilan ekonomi menjadi problem setiap negara di dunia, termasuk di Indonesia. Forum ekonomi tingkat dunia G-20 dan World Bank mencatat pada tahun 2018 bahwa negara miskin di dunia masih mencapai 40 % dari jumlah negara dunia. Indonesia yang tergabung dalam negara berkembang pertumbuhan ekonomi hanya tercatat 5,02 % dari jumlah PDB penduduk Indonesia pada tahun 2019. Artinya, Indonesia dikategorikan negara yang belum sejahtera oleh World Bank, karena jumlah penduduk miskin Indonesia masih di atas angka 10%. Untuk memecahkan kemiskinan dan ketidak-adilan ekonomi,

perlu adanya langkah konkrit dan berkelanjutan dalam mensejahterakan rakyatnya. Olaf Corry menegaskan untuk menjadikan negara sejahtera perlu melibatkan tiga stakeholder yang saling bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, kebijakan pemerintah dalam jaminan sosial. Kedua, pelibatan swasta dalam pertumbuhan ekonomi industry, ketiga, pelibatan organisasi nirlaba atau volunteer sosial yang bertujuan membantu masyarakat dalam pembinaan sector ekonomi. Sementara, As-syatibi, tokoh ekonomi islam yang populer dengan maqashid syariah menjelaskan untuk mencapai negara sejahtera diperlukan lima aspek dalam kehidupan manusia termasuk manusia Indonesia. Memelihara akal manusia, Jiwa yang shaleh, Agama, Keturunan dan harta. Kelima fase pokok tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia jika ingin disebut merdeka dan sejahtera secara ekonomi syariah.

Kata kunci : *negara sejahtera, Maqashid Syariah, ekonomi syariah*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia menjadi persoalan yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah dan sosial. Meskipun setiap tahun angka presentase kemiskinan mengalami penurunan. Tahun 2018 angka kemiskinan mencapai 10,8% dari angka PDB Indonesia, menurun 0,3 Persen dari tahun sebelumnya 2017. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pendapatan penduduk miskin dan pendapatan buruh sebesar Rp. 3,400.000,-⁶⁰. Sementara angka kemiskinan di dunia juga mengalami penurunan, sebesar 56,8% pada tahun 2018. Ini menunjukkan angka kesejahteraan masyarakat dunia mengalami peningkatan, begitu juga dengan penduduk Indonesia.

Kendati angka kemiskinan terus menurun, namun hasil Survei Litbang Media Group yang dilakukan oleh Hilda, terhadap 480 responden yang diambil secara acak dari daftar pemilik telepon enam kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar). Responden ditanya bagaimana pendapatannya sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah dirasakan semakin berat atau ringan? Mayoritas responden (73%) merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin berat; sebanyak 21% responden merasakan sama saja; dan hanya 6% yang merasakan semakin ringan. Ketika ditanyakan apakah sekarang ini mendapatkan pekerjaan baru dirasakan semakin sulit atau semakin mudah, sebagian besar responden (89%) merasakan sekarang makin sulit mencari pekerjaan baru; sebanyak 5% responden merasakan sama saja; 4% merasakan makin mudah; dan 2% tidak tahu.⁶¹

Hasil survei dan laporan kemiskinan tersebut kerap kali menjadi acuan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Juga, memberikan jaminan sosial berupa bantuan pangan, bantuan beasiswa dan bantuan keluarga harapan. Namun, jaminan sosial tersebut tidaklah cukup untuk mengurangi angka kemiskinan di setiap daerah di Indonesia.⁶² (Soetomo, 2012:87). Dia menjelaskan, penyelesaian kemiskinan tidak cukup hanya peran pemerintah, tetapi membutuhkan peran sosial dan lembaga sosial.

Dalam menyelesaikan masalah sosial bisa dilakukan dari berbagai pendekatan, baik micro, intermediate dan makro. Pada tingkat mikro penyelesaian sosial bias melalui pembangunan masyarakat ditujukan kepada individu yang mempunyai masalah, baik

⁶⁰ Suharto, *laporan UNDP*, Jakarta, 2017, hal 4

⁶¹ Hilda, *litbang media group*, publishing, 2018

⁶² Soetomo, *Pembangunan Masyarakat, Merangkai sebuah Karangka*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2012

dilihat dari kehidupannya dan prilakunya. Misalnya, apakah seseorang itu miskin, terlilit hutang dan pengangguran. Atau individu itu mengalami persoalan keluarga seperti terpidana, tidak punya keluarga dan tidak utuh. Pemecahan sosial ini dilakukan dengan cara proses resosialisasi-pemberdayaan. Untuk mendorong agar terjadi perubahan sosial maka harus ada pelayanan sosial yang mendorong orang berubah.⁶³

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Negara Sejahtera

negara sejahtera menurut Joseph E Stiglitz adalah dimana hak-hak dasar warga negara direalisasikan dan terpenuhi baik secara formal dan non formal. negara sejahtera bisa terwujud apabila kebijakan pemerintah dapat bergandengan tangan antara pemerintah dan masyarakat. negara sejahtera membebaskan masyarakat dari asal usul mereka, membebaskan keterbatasan ekonomi, membebaskan dari keterbatasan pasar, dan memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menentukan hidupnya sendiri.⁶⁴

Sementara Palmer mendefinisikan negara sejahtera adalah negara harus bertanggung jawab atas dua hal yaitu Krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan negara maju jika suatu negara menjamin-terhindar crises ekonomi yang selama ini melanda dunia. Bahkan, negara harus memberikan jaminan utang dan kesenjangan ekonomi karena krisis ekonomi. Juga, pertumbuhan ekonomi harus melampaui 7 % dari pendapatan PDB penduduk setempat. Karena itu, Palmer menegaskan negara sejahtera tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang sacral, sesuatu yang berada diluar pertanyaan dengan sendirinya baik, hanya semata-mata berpegang teguh kepada tujuan dan visi, misi negara, tetapi harus berpegang teguh kepada pertumbuhan ekonomi.⁶⁵

Perdebatan para tokoh ekonomi tentang negara sejahtera tentunya mengalami pro dan kontra. Karena, konsep negara sejahtera dalam konteks dunia modern dengan system sosial-demokrasi seperti saat ini sangatlah jauh dari tujuan dan impian masyarakat. Salah satu yang mempunyai pandangan moderat terhadap negara sejahtera adalah Francis Fukuyama. Menurut Francis Fukuyama, kegagalan ekonomi di sejumlah negara miskin dan berkembang tidak sepenuhnya dapat ditimpakan sebagai kesalahan *neo liberalism* atau kegagalan dalam system ekonomi liberalisme semata. Dalam banyak kasus system liberalisme banyak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam sebuah negara, di satu sisi pertumbuhan ekonomi tergantung pasar ekonomi, di sisi lain pemerintah harus memberikan jaminan sosial kepada warga negara dalam mengatasi kegagalan pasar ekonomi.⁶⁶ Karena itu, liberalism dan kebijakan pemerintah harus bekerja sama dalam memutuskan mata rantai kesenjangan ekonomi.

Sementara Musa As-syatibi menjelaskan bahwa tujuan negara sejahtera tidak boleh melanggar tujuan kemaslahatan sosial yaitu tujuan pemberdayaan manusia-kebebasan manusia. Maqashid As-syatibi dalam kaitan negara sejahtera adalah daruriyat (kepentingan pokok atau primer manusia), hajjiyat (kepentingan sekunder), Tahsiniyat (kebutuhan tersier). Assyatibi menyatakan Allah sebagai syar'i memiliki tujuan dalam

⁶³ Ibid, Soetomo,

⁶⁴ The Welfare state is a major Achievement of civilization in the twentieth century. It supplements civil rights and freedoms with social rights. That is why for us democracy and welfare state go hand in hand. Palguna, Welfare state dan Globalisasi, Jakarta, Rajawali Pres, 2019,

⁶⁵ Tom G Palmer, *After the Welfare State, student for liberty* and atlas network. (Arlington Washington, 2012)

⁶⁶ Francis Fukuyama, *State Building*, 2005, Governance and world order in the Twenty.

setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akherat. yang diutamakan adalah kemaslahatan umat bukan kemegahan dan pertumbuhan ekonomi semata.⁶⁷ Proses dalam menentukan maqashid syariah harus memenuhi tiga hal yaitu,; kemaslahatan yang dituju adalah kemaslahatan yang termasuk dalam konsep maqashid. Tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah Nabi. Bersifat qat'I atau diatas tingkatan dzanni dan bersifat universal.

2. Negara Sejahtera dalam pandangan Ekonomi

Keberadaan negara sebagai pengayom warga negara tentunya mempunyai visi dan misi yang sangat mulia, yakni menjadikan negara maju dan sejahtera. Indikator negara sejahtera menurut Umar Chapra, adalah pertumbuhan ekonomi negara dan penghapusan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan negara, namun sampai saat ini cita-cita dan impain itu tidak pernah tercapai. Adam Smits (1776), tokoh ekonomi Klasik mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi harus menggunakan lima Fase : Kapitalisme, Modal sosial, nilai moral agama, Nilai sosial ekonomi dan Nilai tauhid.

a. Fase Ekonomi Klasik (1776)

Tujuan negara sejahtera ditandai dengan kemunculan tokoh Ekonomi klasik berlangsung selama 150 tahun. Ekonomi Klasik muncul di dunia Barat pada abad ke-2, dimana lahirnya system ekonomi yang berideologi Liberalisme melalui system yang dikenal dengan *laize faire*. Masa ini adalah masa pembangunan ekonomi di benua Eropa dengan revolusi industry. Tekhnologi industry muncul seperti mesin foto copy, mesin uang dan lainnya. Ciri-ciri Ekonomi klasik ini menyertai kehidupan masyarakat melalui pasar bebas. Ekonomi dipasrahkan kepada pasar, dimana masyarakat akan berlomba-loma untuk mencari keuntungan dengan mikanisme pasar dan persaingan.⁶⁸ Sehingga, timbul kesenjangan ekonomi, antara orang kaya dan miskin. Pemilik modal akan menguasai pasar dan ekonomi, sementara orang miskin hanya menjadi pekerja sosial.

Di sisi lain ekonomi klasik gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat, karena menimbulkan gejolak besar yakni inflasi tinggi dan pengangguran dimana-mana. Hal itu terjadi pada tahun 1930, dimana krisis ekonomi melanda dunia terutama negara Barat (Eropa) seperti Jerman, Rusia dan lainnya yang menggunakan system pasar dan ekonomi klasik. Kesenjangan antara manusia sangat meluas, sehingga terjadi praktik kolonialisme bagi negara.⁶⁹ Ekonomi klasik gagal memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, karena terjadinya konflik kepentingan antara orang kaya dan miskin. Perbedaan pendapatan, menjadi penyebab terjadinya ekonomi mandek dan krisis ekonomi menjadi faktor utama kegagalan dalam system ekonomi klasi.

b. Fase Ekonomi Sosialisme State

Fase ini ekonomi dunia ditandai dengan hadirnya peran negara dan pemerintah dalam masalah pembangunan ekonomi. Era ini dikenal dengan era sosialisme dengan teorinya *John Maynard Keynes*. Keynes menawarkan pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat melalui peran aktif pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat.

⁶⁷ As-Syatibi *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*, Libanon dar Al-Kutub, 2004, hal 43

⁶⁸ Palguna, *Welfare State dan Globalisasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2019, hal 32

⁶⁹ Sri Edi Swasono, *Pradigma baru ilmu ekonomi*, Jakarta: (UIN Jakarta Pres, 2012), hal 07

Fase sosialisme dinyatakan bahwa negara mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi melalui kebijakan fiskal, kebijakan perlindungan sosial.⁷⁰ Perlindungan sosial dan bantuan pemerintah dapat meringankan beban masyarakat miskin untuk dapat mengakses bantuan pemerintah dan pemerataan ekonomi. negara mengatur kebijakan fiskal, moneter, ekspor dan impor, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Keynes menekankan bahwa pembangunan ekonomi dititik beratkan kepada Sumber Daya Manusia untuk menopang krisis ekonomi. Deficit dan utang negara ditutupi melalui ekspansi ekspor dan peningkatkan produksi pemerintah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi local, memberikan lapangan pekerjaan, memuperketat kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.⁷¹

Kendati demikian, fase ini juga gagal dalam mensejahterakan manusia dan masyarakat serta distribusi keadilan masih terjadi ketimpangan di masyarakat, terutama di negara Eropa.

c. Fase Neo Liberalisme

Fase ini adalah Neo libelarisme yang memfokuskan kepada pembangunan ekonomi kepada pasar dan glibalisasi ekonomi, juga mengakomodir peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi, sehingga melahirkan distribusi ekonomi yang berkeadilan dan keseimbangan. Tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan kesimbangan ekonomi dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Pada fase ini ekonomi dunia dikenal dengan globalisasi ekonomi dan pasar bebar, dimana semua negara melakukan perjanjian ekonomi dan tukar menukar barang sebagai alat untuk kesejahteraan ekonomi negara. Pasar bebas mengantarkan negara maju menjajah negara miskin untuk menguasai ekonomi dan sumberdaya alam, sehingga terjadi kesejangan dan konflik berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat.⁷²

System Neo Liberalisme ini gagal dalam mensejahterakan rakyatnya karena kekayaan masih bertumpu kepada orang kaya saja, sementara orang miskin belum terdistribusi dengan maksimal, sehingga kekayaan masih dinikmati oleh sebagian orang saja. Juga belum mampu mengatasi krisis ekonomi dan kemiskinan yang semakin lebar, utamanya negara berkembang.

d. Fase Sosial dan Moralitas Sosial

Fase ini ada penyesuaian antara peran social, nilai agama dan tujuan pembangunan ekonomi. Dimana masyarakat sudah dilibatkan dalam pembangunan ekonomi untuk tujuan keadilan ekonomi. Semisal, komunitas independen, komunitas nirlaba, komunitas media dan Lembaga voluntir dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Peran modal sosial melengkapi modal Sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, dengan mereka saling memberdayakan, yaitu rasa saling percaya, rasa kasih sayang antar sesama dan menjalankan norma-norma sosial, jaringan sosial. Trust menjadi penopang pembangunan ekonomi ditingkat daerah, karena rasa percaya-saling memahami menjadi modal sosial

⁷⁰ Ibid, Palguna, hal 40

⁷¹ Mustafa Anas Zarqa, *islamic Economic : an Approac to Human welfare*, (Salagor Malaysia, 1989), hal

⁷² Ibid, hal 86

untuk kesejahteraan sosial. Juga pentingnya peran modal sosial dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat yang selama ini belum diatasi.

Modal sosial itu seperti saling gotong royong, peduli sesama, dan berkebudayaan menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi. Norma-norma adalah nilai moral dalam pandangan agama, juga jaringan sosial, keluarga, marga dan kelompok membantu memperkuat nilai-nilai dengan memberikan tekanan sosial. Juga modal sosial dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan keadilan sebagai bentuk realisasi dari kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

e. Fase nilai agama atau moral agama

Fase ini sangat erat kaitannya dengan nilai agama dan ajaran agama sebagai petunjuk kesejahteraan negara dan pembangunan ekonomi masyarakat. Karena, antara agama dan ekonomi sangat erat hubungannya dalam memberdayakan manusia. Agama lahir dari Tuhan sangat pencipta alam. Agama sebagai petunjuk arah bagi manusia hidup, termasuk didalamnya perilaku ekonomi dan pengelolaan ekonomi.

Agama mempunyai pesan moral untuk manusia dalam berperilaku sosial dan pembangunan ekonomi, demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Tuhan memberikan tugas berat kepada manusia sebagai *khalifah fil Ardh*, mensejahterakan bumi dan alam, untuk kepentingan masyarakat. Penentuan sifat baik dan buruk seseorang sangat dipengaruhi oleh penilaian manusia secara umum dengan penuh kesadaran. Sifat baik dan buruk tersebut diterima oleh masyarakat, karena ketentuan tersebut. Karena itu, nilai agama sangat mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia dalam pembangunan ekonomi. Nilai agama tersebut menurut Umar Chapra, bahwa :

- 1) Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh penilaian pribadinya atau subjektif.
- 2) Manusia pada umumnya cenderung memiliki pandangan jangka pendek.
- 3) Manusia cenderung tidak memiliki informasi yang memadai untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

3. Negara sejahtera dalam pandangan As-syatibi (maqashid As-syariah)

Musa As-syatibi adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu maqashid As-syariah yang menyatakan bahwa maqashid mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan usul fiqh karena teori maqashid cocok dengan criteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas.⁷³ Sebagaimana dalam kajian tentang negara sejahtera yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan sosial kepada masyarakat.

Maqashid As-syariah berfungsi untuk melakukan dua hal yakni tahsil yaitu menggunakan manfaat (maslahat) dan kedua *Ibqa'* (mencegah kerusakan) atau mudharat dalam sosial masyarakat. Maslahat dalam kajian ini adalah kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan negara, dimana fungsinya adalah terciptanya keadilan ekonomi dan pembangunan dan menghindari krisis ekonomi dan kemiskinan yang berkepanjangan.⁷⁴

Maqashid syariah terhadap kajian negara sejahtera dibagi dalam lima fase yang mengedepankan kemaslahatan dan kesejahteraan yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

⁷³ As-syatibi, *Al-muwafaqat fi usul asy-Syariah*, (Libanon, 2004), hal 54

⁷⁴ Ibid, hal 60

a. Hifzh Addin (menjaga agama)

Dalam kaitannya dengan negara sejahtera, *Hifzh Addin* adalah pemerintah harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga negara dalam menganut agama masing-masing. Agama harus menjadi sumber dan petunjuk bagi warga negara dalam menjalani hidup didunia. Karena tujuan negara sejahtera adalah warga negara merasakan kebahagiaan dalam menjalani agama dan tidak merasa terganggu. Kendati demikian, menjaga agama bukan menjadikan negara beragama, tetapi warga negara dijamin dalam memeluk agama.

b. Hifzh Annfis (Menjaga Jiwa)

negara sejahtera harus memberikan kemaslahatan dan kedamaian bagi warga negara dan penduduk bumi. Kedamaian, saling gotong royong, menghindari konflik sosial dan hidup bahagia adalah bagian dari tujuan negara sejahtera. As-Syatibi menjelaskan menjaga jiwa adalah setiap individu yang hidup di sebuah negara harus terjamin dan tidak terancam jiwanya dalam menjalani hidup, baik secara ekonomi, sosial dan berpolitik. Menjaga jiwa adalah memberikan jaminan sosial kepada warga negara, seperti BPJS, melindungi pendidikan, memberikan beasiswa kepada orang miskin, memberikan sembako kepada orang jumbo.

c. Hifzh Al-Amal (menjaga harta)

negara sejahtera harus memberikan perlindungan kepada warga negara, baik jiwa, harta dan martabatnya. negara harus hadir melindungi dan memberikan keamanan terhadap pengelolaan ekonomi masyarakat, termasuk pihak swasta yang berinvestasi di sebuah negara. Perlindungan ekonomi ini menurut As-Syatibi sangat luas, termasuk melindungi setiap warga negara yang hendak melakukan investasi, berbisnis, wirausaha dan mengelola ekonomi, sehingga dengan keamanan yang diberikan negara, masyarakat merasakan kehadiran negara.

d. Hifzh Nasl (menjaga Keturunan)

Negara harus menjamin terhadap kehidupan warganya termasuk keturunan dan bayi yang baru lahir dengan cara memberikan perlindungan terhadap ibu hamil dan bayi stuntik. negara juga memberikan perlindungan kepada anak-anak jalanan dan anak busung lapar, anak-anak yang terjangkit narkoba, sehingga lahir konsep keluarga berencana. negara juga hadir memberikan perlindungan dengan konsep kota ramah anak, kota wisata anak dan pendidikan anak-anak sejak usia dini. Artinya negara menjaga keturunan demi generasi masa depan.

e. Hifzh Al-Aql (Menjaga Akal)

Perlindungan dan peningkatan sumber daya manusia wajib dilakukan oleh negara sejahtera. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi dan visi yang kuat dalam meningkatkan kemampuan setiap warga negara, baik dalam pendidikan, vokasi dan keterampilan. Oleh karena itu, pendidikan vokasi dan pendidikan karakter, life skill, hard skill, wajib diterapkan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam di suatu negara. Menjaga akal juga negara hadir dalam memberikan beasiswa pendidikan, dan perlindungan pendidikan kepada pihak swasta dan masyarakat.

Berbeda dengan As-Syatibi, Umar Chapra, seorang tokoh ekonomi islam mengatakan, bahwa untuk mencapai negara sejahtera, maka pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan indicator

memberikan perlindungan dan menjamin hidup setiap warga negara. Kebijakan pembangunan harus menjamin kelangsungan hidup manusia, segala sesuatu yang dapat melindungi jiwa harus dijaga, dan segala sesuatu yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia harus dibasmi.

Oleh karenanya, perlu verifikasi kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, tidak hanya demi tercapainya peningkatan dan kesinambungan kesejahteraan. Tapi juga agar mereka dapat memainkan peran utamanya sebagai *Khalifah fil ardhi*, untuk memperkuat kehidupan manusia. setidaknya ada 14 aspek kehidupan perlindungan jiwa yang harus diepenuhi.⁷⁵

1) *Self Respect, human brotherhood and social equity.*

Demi memperkuat kehidupan manusia, maka hal penting dilakukan adalah penegakan harga diri, penghormatan diri (*slef respect*), persaudaraan, dan persamaan sosial (*social equity*), sebagai wakil Allah di muka bumi, maka manusia mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi. Mereka harus hidup berdampingan secara damai, saling menghormati serta saling memperhatikan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

2) Keadilan (*Justice*)

Kebutuhan dari manusia adalah keadilan sosial. Penegakan keadilan menjadi misi utama dari setiap lahirnya nabi. Ketidakadilan akan menimbulkan kerugian dan cemburu sosial sehingga timbul kesenjangan ekonomi dan sosial. Ketidakmerataan (*innequaty*) merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga islam melarang perbuatan curang dan ketidakadilan.⁷⁶

3) *Spiritual and Moral Uplift*

Peningkatan spiritual dan moral menjadi kebutuhan ketiga dari manusia daemi mencapai kesejahteraan sosial dan kepuasan spiritual. Akhlak yang tinggi menjadi contoh dan pokok dalam sisi kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, manusia membutuhkan akhlak.

4) *Security of life*

Islam beserta nilai-nilai yang dikandungnya menekankan kebutuhan keempat dari manusia, yaitu jaminan hidup (*security of life*), kekayaan (*property*) dan kehormatan (*honour*). Islam sangat melarang segala bentuk tindakan kekerasan dan anarkisme dalam bentuk apapun. Keselamatan dan keamanan dalam diri manusia sangat berarti, sehingga setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman.

5) *Family and social solidarity*

Untuk menciptakan keluarga yang saling mencintai, berkasih sayang dan menyenangkan antara satu dengan yang lain dalam keluarga, maka islam menganjurkan bahwa persaudaran adalah hal penting, apalagi menjaga keluarga dan jiwa dari siksaan api neraka.

⁷⁵ M Umar Chapra, *The Islamic Vision Of Development*, (Jeddah, IDB,2008) hal 8

⁷⁶ Ibid, hal 10

f. *Freedom*

Kebebasan dalam kehidupan adalah sesuatu yang sulit dihindari dari manusia. kebebasan adalah syarat utama dalam pengembangan kepribadian manusia. Tanpa kebebasan dan manusia tidak akan dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi. Dan akhirnya akan berdampak pada pengemangan manusia dan kesejahteraannya. Sebagai *khalifah* dimuka bumi, manusia diberikan kebebasan penuh oleh Allah Swt dengan melakukann kreatifitasn dan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Manusia mempunyai tujuan mulia yakni pengelola bumi beserta isinya untuk kesejahteraan umat.

g. *Education*

Kebutuhan manusia selanjutnya adalah penddidikan, pengayaan intelektual melalui kualitas poendidikan yang baik, pendidikan harus berperan dalam 3 hal. Pendidikan harus mencerahkan seluruh umat manusia dan meninggikan nilai-nilai penguatan visi dan misi manusia. 2. Pendidikan harus menyadarkan manusia untuk kepentingan bertaqwa dan mengabdikan kepada sang khaliq-nya. Atas dasar itu manusia akan mendapatkan derajat -kemuliyaaan disisi Tuhan. 3. Pendidikan harus mencerdaskan anak bangsa, menghilangkan kebodokhan dan ketertindasan, dengan pendidikan manusia menjadi setara dan tidak ada penakanan atas orang-orang bodoh.

h. *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang baik adalah kebutuhan penting bagi manusia. tanpa adanya tata kelola yang baik, stabilitas politik dan kepedulian sosial, maka tata sosial masyarakat akan menjadi tidak stabil. Tindakan criminal dan sewenang-wenang menjadi tontonan yang sering diperlihatkan oleh pejabat pemerintah dan politisi. Sehingga tindakan yang bersih dan pengelolaan yang baik masih menjadi cita-cita dan impian banyak orang. Oleh karena itu, tindakan good Governance harus menjadi misi setiap manusia dalam mengelola kekayaan Indonesia.

i. *Removal of proverty and need fulfillment*

Kemiskinan akan menyebabkan pelemahan kapasitas dan ketergantungan kepada orang lain. Kemiskinan juga akan menyebabkan orang menjadi fakir dan lemah iman, karena itu islam melarang umatnya menjadi miskin. Islam menganjurkan umat untuk bekerja keras dan berbisnis dalam rangka meningkatkan omset -kesejahteraan keluarga.

j. *Employment and Self-Employment Opportunitess*

Islam sangat melarang perilaku meminta-minta dan pemalas, karena itu orang yang pemalas dalam Al-quran disebut orang yang rugi. Rugi dalam urusan dunia dan rugi dalam urusan akherat. Manusia dianjurkan untuk bekerja memenuhi kebutuhannya dan berkewajiban dalam melaksanakan kebutuhan sosial berserta keluarganya.⁷⁷

k. *Equitable distribution Income*

Al-quran menganjurkan agar kekayaan didistribusikan kepada orang-

⁷⁷ M Umar Chapra,

orang yang membutuhkan, jangan sampai kekayaan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu saja, karena itu islam harus didistribusikan kepada orang lain. Keadiklan distribusi kekayaan inilah yang mengantarkan kesejahteraan sosial demi mewujudkan dan menguatkan keimanan. Pemerataan pendapatan harus berputar kepada mereka yang miskin, demi terwujudnya kesejahteraan.

l. *Marriage and stable family life*

Laki-laki dan perempuan membutuhkan keluarga melalui pernikahan yang dimaksudkan memenuhi kebutuhan sosial/ dan pasangan hidup mereka untuk menyenangkan dan menentramkan masyarakat. berKeluarga adalah sunah yang dianjurkan untuk mengangkat derajat dan melestarikan tradisi islam yang mulia dan menghindarkan dari perbuatan zina.

m. *Family And sosial Solidarity*

Untuk menciptakan keluarga yang saling mencintai-saling menghargai berkasih sayang dan menyenangkan antara suami dan isteri, maka Al-quran memberikan hak yang sama pada perempuan terhadap laki-laki.

n. *Minimizion of Crime and mental Peace dan Happines*

Semua pemenuhan kebutuhan manusia diatas, demi memperkuat kehidupan manusia harus dapat menciptakan kondisi kehidupan masyarakat bermasyarakat tanpa tingkat kriminalitas yang tinggi. Tingginya kriminalitas akan mengganggu pembangunan manusia dan kesejhetaraan.

Sementara Al-Ghazali memnejaskan bahwa kesejahteraan di bagi menjadi 3 bagian: Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia saling terikat antara satu dengan yang sehingga disebut mahluk sosial. Karena itu, Al-Ghazali membagi kebutuhan manusia menjadi tiga (yaitu) *daruriyat, hajiyat, tahsiniyat*.⁷⁸

- 1) Daruriyat adalah landasan dalam menegakan kesejahteraan manusia di dunia dan diakherat yang mencakup pemeliharaan kelima unsure pokok kehidupan agama. Daruriyat adalah kebutuhan pokok yang harus ada pada diri dalam manusia yang apabila tidak dipenuhi akan mengancam keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Hajiyat (kebutuhan sekunder) kebutuhan sekunder apabila tidak terwujud tidak akan mengancam keselamatan manusia, namun manusia akan mengalami kesulitan dan syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsob* (keringanan) adalah salah satu cara untuk mengakomodir kebutuhan sekunder ini. Islam mensyariatkan beberapa *rukhsob* bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah swt.
- 3) Tahsiniyat adalah kebutuhan apabila tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok fungsi kehidupan ini. Kebutuhan ini merupakan pelengkap bagi kebutuhan yang lain, untuk menyempurnakan kehidupan manusia.

4. Ekonomi islam sebuah alternatif

Tujuan pembangunan menurut ekonomi islam adalah harus memberikan kemakmuran dan kebahagiaan kepada manusia di dunia dan akhirat kelak yang dalam agama disebut Al-falah. Dalam kontek Al-Falah sadew menjelaskan, two stage

⁷⁸ Ghazali, Abdul Hamid, *Man Is The basic of the Islamic strategy for economic development*, Jeddah,1994

permanent life of human beings, kehidupan manusia terdiri dari dua tahap, yakni kehidupan di dunia yang bersifat temporer dan kehidupan di akherat yang bersifat permanen dan abadi. Diharapkan kesejahteraan (falah) di kedua tahapan ini, sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan manusia (human welfare) adalah fungsi dari kesejahteraan di kedua kehidupan tersebut. Falah adalah kesejahteraan sementara dan kesejahteraan permanen.⁷⁹

Kesejahteraan yang hakiki adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia. Juga memberikan kedamaian dan kedisiplinan untuk mencapai kondisi sosial kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sesungguhnya nilai-nilai islam membantu untuk menjaga kedisiplinan, keharmonisan dan jalinan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai islam merupakan elemen hakiki pembentuk lingkungan yang lebih baik dan kesejahteraan di dunia dan di akherat.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi islam adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan penduduk -warga negara, serta pemertaan pendapatan atau harta. Islam menganjurkan agar perputaran modal dan ekonomi tidak didistribusikan kepada orang-orang kaya saja, melainkan harus berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendapatannya tinggi adalah indikator kenyamanan hidup bagio warganya dengan tersedianya makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesalehan sosial. Disitulah islam menegaskan bahwa kemiskinan bisa merusak agama dan moral seseorang, sehingga islam menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Swt agar terhindar dari kemiskinan dan kehinaan didunia.

Menurut Nawawi, keberhasilan pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik bersifat ekonomi dan sosial.⁸⁰ Faktor inilah yang disebut sumber daya yang kemudian dikenal dengan sumber material dan non material. Menilai kapasitas produksi suatu penggunaan ekonomi dapat dilihat dari fungsi produksi yaitu suatu hubungan antara input dan output. Input adalah barang-barang yang dihasilkan untuk produksi, sementara output adalah barang-barang yang dihasilkan dari input.⁸¹ Sementara Ganovetter menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh situasi sosial. Dimana tindakan sosial akan memberiklan pengaruh signifikan dalam pembangunan ekonomi secara umum. Tindakan sosial itu adalah jaringan pekerja, industry dan distribusi ekonomi.

Pembangunan ekonomi gagal akrena adanya faktor :

- a. pengangguran
- b. Kemiskinan
- c. Ketimpangan,
- d. Stagnasi pembangunan
- e. Dominasi intelektual

Syarat dalam pembangunan ekonomi adalah

- 1) Kecukupan modal
- 2) Perkembangan sosial /penduduk
- 3) Tekhnologi

Kebijakan yang harus ditempuh dalam pembangunan ekonomi

- 1) Penyediaan pendidikan dan kesehatan
- 2) Pelayanan umum
- 3) Perbaikan pertanian dan ketahanan pangan

⁷⁹ Sadeq, *Economic development in islam*, Jurnal Of Islamic Economic, Vol, I tahun 1987, hal 43

⁸⁰ Nawawi, *pembangunan ekonomi islam*, (Surabaya UIN pres, 2013), hal 76

⁸¹ Ibid Nawawi... hal 57

- 4) Kebijakan fiscal
- 5) Kebijakan moneter
- 6) Kewirausahaan

Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dalam suatu negara, yakni harus memenuhi rambu-rambu syariah yakni pembangunan ekonomi yang berkeadilan dengan landasarn kemaslahatan umat-masyarakat. Indicator pemerataan ekonomi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan pokok warga negara, pemberian jaminan sosial dan jaminan jiwa yakni kebahagiaan setiap warga negara. negara harus memberikan jaminan ekonomi, sumber daya manusia, harta-kekayaan dan keadilan pembangunan.

C. KESIMPULAN

Negara sejahtera menurut As-syatibi negara tidak boleh melanggar tujuan kemaslahatan sosial yaitu tujuam pemberdayaan manusia-kebebasan manusia. Maqashid Syariah dalam kaitan negara sejahtera adalah daruriyat (kepentingan pokok atau primer manusia), hajjiyat (kepentingan sekunder), Tahsiniyat (kebutuhan tersier). Assyatibi menyatakan Allah sebagai syar'i memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akherat. yang diutamakan adalah kemaslahatan umat bukan kemegahan dan pertumbuhan ekonomi semata. Proses dalam menentukan maqashid syariah harus memenuhi tiga hal yaitu: kemaslahatan yang dituju adalah kemaslahatan yang termasuk dalam konsep maqashid. Tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah Nabi. Bersifat qat'i atau diatas tingkatan dzanni dan bersifat universal.

Sementara Ibnu Khaldun menjelaskan Indicator pemerataan ekonomi dengan pemenuhan kebutuhan pokok warga negara, pemberian jaminan sosial dan jaminan jiwa yakni kebahagiaan setiap warga negara. negara harus memberikan jaminan ekonomi, sumber daya manusia, harta-kekayaan dan keadilan pembangunan ekonomi. Kebahagiaan hidup setiap warga negara ditandai dengan pemberian hak-hak warga dan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok primer dan sekunder. Kebutuhan primer, seperti perbaikan rumah yang tidak layak huni, perbaikan jalan rusak, perbaikan saluran air minum dan sebagainya. Sementara kebutuhan sekunder adalah pemenuhan kebutuhan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dengan beasiswa miskin, jaminan investasi dan jaminan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Syatibi *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*, Libanon dar Al-Kutub, 2004
- Francis Fukuyama, *State Baiding*, 2005, Governance and word order in the Twenty.
- Ghazali, Abdul Hamid, *Man Is The basic of the Islamic strategy for economic development*, Jeddah,1994
- Palguna, *Welfare State dan Globalisasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2019
- Mustafa Anas Zarqa, *islamic Economic : an Approac to Human welfare*, (Salagor Malaysia, 1989)
- Nawawi, *pembangunan ekonomi islam*, (Surabaya UIN pres, 2013)
- Sadeq, *Economic development in islam*, Jurnal Of Islamic Economic, Vol, I tahun 1987
- Umar Chapra, *The Islamic Vision Of Develoment*, (Jeddah, IDB,2008) hal 8
- Sri Edi Swasono, *Pradigma baru ilmu ekonomi*, Jakarta: (UIN Jakarta Pres, 2012)
- Soetomo, *Pembangunan Masyarakat, Merangkai sebuah Karangka*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2012
- Tom G Palmer, *After the Welfare State, student for liberty and atlas network*. (Arlington Washington,2012)